

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi merupakan titik tolak perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia ke arah yang nyata. Reformasi juga memberikan hikmah yang sangat besar kepada daerah-daerah untuk menikmati otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah memiliki hak ketika menyelenggarakan otonomi daerah. Berikut ini adalah hak-hak tersebut yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004.

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah

Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai kosekuensi dari adanya kewenangan tersebut.

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Daerah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi (Setiaji dan Adi, 2007)

Selain itu, dengan adanya otonomi, diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif dalam mengatur daerah. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menganalisis peluang yang ada untuk memajukan daerah dengan melakukan identifikasi sumber-sumber penerimaan yang potensial, dan juga harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam

berbagai sektor yang kemudian dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah.

Namun pada kenyataannya masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah, ada juga yang tidak. Ada daerah yang tata perekonomiannya sudah baik, ada juga yang masih tertinggal. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan tersebut dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan yang ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN. Dana Perimbangan ini terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Besaran dana perimbangan berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada potensi sumber-sumber dan kekayaan alam ataupun jumlah penduduk yang terdapat di daerah tersebut. Pada umumnya daerah yang PAD-nya masih rendah, lebih mengandalkan pada penerimaan dari dana perimbangan. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Sebenarnya bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan rangsangan bagi daerah untuk lebih meningkatkan PAD-nya, yang merupakan salah satu bagian penting dari sumber penerimaan daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan Negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber

keuangan yang dikuasainya. Dalam hal ini pemerintah daerah sangat memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam pembangunan di daerah. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber penerimaan yang dikelola dan diperoleh melalui usaha-usaha sendiri oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah tersebut. Disamping itu, PAD juga merupakan salah satu syarat utama keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan PAD ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintah Daerah, yaitu kerjasama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dengan cara pendekatan terpadu dengan tidak menghilangkan identitas, baik tugas dan fungsi masing-masing.

Pada dasarnya, implikasi dari otonomi daerah ini menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh setiap daerah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi daerah dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto rill atau pendapatan nasional rill. Jadi,

perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada satu periode tertentu. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti, meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Adanya keberhasilan peningkatan yang signifikan yang diciptakan PAD tidak hanya dinilai dari jumlah penerimaan melainkan juga peningkatan PAD dinilai dari perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang. Menurut Brata dalam (Murni; 2010) menyatakan bahwa “terdapat komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yaitu PAD.” Jika peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan Dana Perimbangan juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai dari Dana Perimbangan pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD.

Di Provinsi Kalimantan Barat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah atau dana perimbangan. Sejauh ini peranan kontribusi PAD dan Dana Perimbangan sebagai pembiayaan pembangunan selalu mengalami peningkatan yang berarti setiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat (lihat tabel 1.1, 1.2, 1.3)

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
Kalimantan Barat tahun 2009-2013
(persen)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi					
	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
Kab. Sambas	5,43	5,88	5,80	5,88	5,99	5,80
Kab. Bengkayang	4,50	4,63	5,65	5,74	6,04	5,31
Kab. Landak	4,71	5,00	6,90	6,03	6,21	5,77
Kab. Pontianak	1,32	2,13	4,86	3,54	5,08	3,39
Kab. Sanggau	4,95	4,15	4,61	5,92	6,04	5,13
Kab. Ketapang	-1,22	7,51	7,98	5,01	6,97	5,25
Kab. Sintang	5,38	5,19	5,45	5,82	6,34	5,64
Kab.Kapuas Hulu	3,70	4,44	4,56	5,61	6,01	4,86
Kab. Sekadau	5,35	5,54	5,73	5,95	6,71	5,86
Kab. Melawi	4,27	5,29	6,54	6,58	6,73	5,77
Kab.Kayong Utara	2,78	5,92	5,93	6,01	6,00	5,33
Kab.Kubu Raya	5,87	6,23	6,51	6,69	6,79	6,42
Kota Pontianak	5,35	5,39	5,88	6,07	6,91	5,92
Kota Singkawang	4,88	5,54	6,46	6,18	6,36	5,88
Kalimantan Barat	4,79	5,35	5,92	5,79	6,30	5,46

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2009-2013

Berdasarkan Tabel 1.1 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat selama lima tahun terakhir sebesar 5,46%. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat berfluktuasi setiap tahunnya. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten dengan jumlah pertumbuhan ekonomi tertinggi (6,42%) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada Kabupaten Pontianak (3,39%). Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, letak strategis suatu wilayah dan komoditi unggulan yang berbeda diantara daerah, sehingga berdampak pada perbedaan laju pertumbuhan ekonomi tiap daerah.

Walaupun rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pontianak merupakan terendah diantara Kabupaten lainnya, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pontianak sudah menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2011-2013 Kabupaten Pontianak mulai bangkit terlihat dari pertumbuhan ekonominya yang meningkat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pontianak disebabkan pemekaran yang terjadi tahun 2007 juga memberikan dampak bagi daerah ini, karena beberapa daerah yang dulu menjadi pusat pengembangan komoditas unggulan telah memisahkan diri menjadi Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 – 2013
(ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah				
	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Sambas	25.207.165,79	26.151.003,41	18.197.426,00	31.751.696,00	46.440.744,00
Kab. Bengkayang	15.297.587,81	11.725.450,41	15.459.810,62	17.887.747,00	22.820.350,00
Kab. Landak	13.254.087,92	15.391.459,33	15.380.000,00	27.698.132,74	33.891.968,67
Kab. Pontianak	21.453.135,33	14.659.381,70	22.226.151,05	26.021.681,00	41.310.034,08
Kab. Sanggau	24.485.202,51	20.524.884,93	35.380.480,93	43.064.349,49	61.545.200,00
Kab. Ketapang	30.171.127,81	30.758.210,65	42.013.010,39	55.869.428,97	131.492.495,00
Kab. Sintang	29.116.966,62	30.269.884,25	53.671.099,00	49.903.179,00	67.398.738,00
Kab. Kapuas Hulu	18.115.662,44	20.616.170,86	20.616.000,00	31.525.600,00	31.133.641,41
Kab. Sekadau	11.390.371,40	11.997.160,34	19.767.839,00	18.364.909,00	35.546.664,88
Kab. Melawi	9.563.085,81	14.074.538,62	9.761.721,15	23.903.980,02	18.134.570,98
Kab. Kayong Utara	5.468.898,44	5.949.463,19	7.820.617,10	55.407.646,76	11.023.420,18
Kab. Kubu Raya	10.317.045,19	13.679.129,56	55.577.649,59	44.201.933,90	64.277.117,32
Kota Pontianak	65.847.726,76	87.368.264,21	87.368.000,00	208.628.660,84	265.271.762,17
Kota Singkawang	22.836.913,98	24.330.714,26	35.346.798,00	37.321.499,06	51.334.878,61
Kalimantan Barat	303.524.977,81	327.495.715,76	438.586.602,83	671.550.443,78	881.621.585,30

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat 2009-2013

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai dana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbilang cukup besar. Dari tahun ke tahun, Kalimantan Barat mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah tersebut. Pada tabel 1.2 terlihat bahwa Kabupaten Kayong Utara memiliki dana pendapatan asli daerah yang terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Ini disebabkan karena kabupaten ini masih merupakan kabupaten baru yang sedang berkembang. Kota Pontianak disini merupakan daerah yang memiliki dana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi daripada daerah-daerah yang lainnya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.3

**Realisasi Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 – 2013
(ribu rupiah)**

Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan				
	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Sambas	427.568.326,00	429.326.568,00	487.749.326,00	651. 388. 045,00	857. 573. 005,00
Kab. Bengkayang	290.271.771,44	348.713.504,73	429.273.733,40	494. 186. 965,00	573. 787. 506,00
Kab. Landak	348.338.493,72	348.338.493,72	445.001.000,00	590. 136. 429,14	668. 671. 401,44
Kab. Pontianak	207.893.668,49	333.976.262,25	431.022.732,43	474. 184. 276,83	535. 687. 787,78
Kab. Sangau	482.871.928,67	497.079.117,76	631.356.798,63	736. 954. 950,77	830. 921. 452,00
Kab. Ketapang	662.373.313,49	683.680.015,02	855.409.816,23	1. 105. 878. 043,01	1. 145. 295. 207,00
Kab. Sintang	529.797.249,00	529.797.249,00	689.003.942,00	780. 049. 463,00	924. 951. 858,00
Kab. Kapuas Hulu	504.003.252,00	504.003.252,00	666.315.000,00	817. 428. 186,87	958. 423. 357,89
Kab. Sekadau	242.103.838,00	242.103.838,00	366.940.175,00	448. 046. 045,00	494. 046. 621,39
Kab. Melawi	321.761.496,79	325.908.024,03	419.843.486,96	592.834. 183,97	591. 371. 558,11
Kab. Kayong Utara	235.523.468,25	240.060.025,27	334.051.720,88	378. 218. 679,46	431. 196. 805,71
Kab. Kubu Raya	407.597.107,97	404.597.107,97	568.776.736,37	656. 353. 283,17	774. 980. 539,72
Kota Pontianak	419.375.167,00	473.786.151,97	499.166.000,00	659. 548. 774,71	699. 877. 420,40
Kota Singkawang	248.854.573,00	294.183.698,98	368.558.783,00	436. 385. 253,67	517. 697. 161,75

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2009-2013

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa dari tahun ke tahun realisasi Dana Perimbangan di setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat sangat besar dan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, Kabupaten Ketapang memiliki Dana Perimbangan yang terbilang cukup besar diantara Kabupaten/Kota lainnya dan selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2013. Tinggi Dana Perimbangan pada Kabupaten Ketapang menunjukkan bahwa daerah ini sangat bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki peranan yang cukup besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Melihat latar belakang dan pentingnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan sebagai pembiayaan pembangunan, penulis tertarik untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi antar Kota/Kabupaten di

Provinsi Kalimantan Barat, maka judul yang diajukan penulis tentang penelitian ini adalah “ PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT “.

Universitas Tanjungpura

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana secara terarah. Selain itu, rumusan masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dari akhir penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dimaksud adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2009-2013?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2009-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2009-2013.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2009-2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapan Asli Daerah (PAD) dan Dana

Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis:

1. Teoritis

- a. Memperjelas mengenai konsep Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi:

a. Penulis

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam hubungannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

b. Bagi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau informasi bagi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pada masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pihak lain yang berguna sebagai acuan untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan permasalahan yang serupa.

Universitas Tanjungpura